

# **PERGUMULAN PEMIKIRAN POLITIK KONTEMPORER**

## **Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global**

Himyari Yusuf\*

### **Abstrak**

Pergumulan politik kontemporer telah melahirkan berbagai bencana kemanusiaan. Dunia politik menampakkan wajah yang terlalu mementingkan kekuasaan pribadi, kelompok dan golongan. Universalitas kepentingan masyarakat menjadi tercabik-cabik dan terabaikan, dan masyarakat menjadi terkotak-kotak. Berbeda halnya dengan politik Islam yang secara ontologis memandang manusia secara holistik dan universal kemudian secara epistemologis bersumber pada Wahyu Tuhan Kuasa dan Sunnah Rasul-Nya. Namun secara historis politik Islam terbilang timbul tenggelam akibat terpaan badai politik Barat sekuler yang haus kekuasaan. Berdasarkan kedua paradigma politik tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah pergumulan politik pada era kontemporer dan adakah urgensi politik Islam dalam era globalisasi dewasa ini. Tulisan ini menggunakan analisis kefilosofan, sehingga diharapkan dapat menunjukkan politik Islam merupakan model politik yang paling relevan dalam menjawab berbagai problem kemanusiaan yang timbul sebagai eksis dari perpolitikan kontemporer yang tidak berpihak kepada kemanusiaan.

**Kata Kunci:** Politik, Kemanusiaan, Keadilan dan Kesejahteraan.

### **Pendahuluan**

Semenjak munculnya pemikiran yang membedakan watak alam sosial dengan alam fisik lebih dari 2500 tahun yang lalu, teori politik telah menarik perhatian pemikir-pemikir dari segala zaman. Bahkan tidak ada bidang pengetahuan dan peradaban manusia

---

\* Dosen Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung.

yang tak tersentuh oleh gairah politik<sup>1</sup>. Kenyataan ini bukanlah hal yang tidak rasional, karena pada hakikatnya manusia memang merupakan makhluk yang memiliki potensi dan keniscayaan untuk berkorelasi, berkomunikasi dan berinteraksi diantara satu dengan lainnya, bahkan dengan makhluk kesemestaan lainnya yang di luar diri manusia. Keniscayaan berkorelasi, berkomunikasi dan berinteraksi adalah dalam rangka pengembangan diri manusia menuju kehidupan yang lebih baik, dinamis, bermartabat, dan sejahtera. Artinya hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan, dimana dan kapan saja manusia berada sepanjang manusia masih menapaki bumi ini. Ringkasnya dapat dikatakan bahwa eksistensi manusia pasti bersentuhan dengan politik, karena memang pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk politik.

Aristoteles misalnya, berpandangan bahwa manusia adalah *political animal* (hewan politik)<sup>2</sup>. Thomas Hobbes juga mengatakan manusia itu adalah *homo homini lupus* (manusia pemangsa manusia lainnya) dan banyak pemikir lain yang sealiran memiliki pandangan yang sama. Artinya pandangan itu semakin mempertegas bahwa di manapun manusia berada pasti dalam masyarakat politik. Oleh karena itu sungguh menjadi aneh jika eksistensi seseorang tidak berkorelasi dan tidak ada kepedulian, tidak apresiatif terhadap kehidupan sesama apalagi tidak memahami hakikat dalam berbagai tampilan realitas sosial masyarakat di sekitarnya.

---

<sup>1</sup>Henry J. Schmandt, *A History of Political Philosophy*, Terjemahan, Ahmad Baidhowi, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), 2002, h. v.

<sup>2</sup>Lihat Aristoteles, *Politics*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, (Bentang Budaya, Yogyakarta), 2004.

## Himyari Yusuf: PERGUMULAN PEMIKIRAN POLITIK.....

Istilah politik dalam bahasa Arab disebut *siyasyah* dan dalam bahasa Inggris disebut *politics*. Politik dalam pembicaraan keseharian diartikan sebagai suatu cara untuk mewujudkan suatu tujuan, walaupun para ahli politik mengakui sangat sulit untuk memberikan pengertian politik secara tepat dan seragam<sup>3</sup>. Inu Kencana menambahkan bahwa asal usul kata politik itu sendiri berasal dari kata *polis* yang berarti negara kota, sehingga dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, yang dalam hubungan tersebut timbullah aturan, kewenangan, perilaku pejabat, legalitas kekuasaan. Politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsekuensi dari kekuatan rakyat<sup>4</sup>.

Secara spesifik politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan (sistem pemerintahan) atau segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat) mengenai pemerintahan negara, atau dapat pula diartikan sebagai cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah<sup>5</sup>. Loren Bagus pun ikut menjelaskan beberapa pengertian politik atau *politikos* (Yunani), yang antara lain adalah perkara yang berkaitan dengan mengelola, mengarahkan, dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan yang menyangkut partai-partai politik yang berperan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup>Inu Kencana Syafe'i, *Ilmu Politik*, (Rineka Cipta, Jakarta), 2010, h. 9. Lihat Inu Kencana, *Pengantar Filsafat*, (Refika Adinata, Bandung), 2007, h. 64.

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 10.

<sup>5</sup>Lukman Ali (dkk), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Balai Pustaka, Jakarta), 1998, h. 780.

<sup>6</sup>Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2000, h. 857.

## Himiyari Yusuf: PERGUMULAN PEMIKIRAN POLITIK...

Berbagai pandangan di atas, secara reflektif menunjukkan bahwa politik merupakan sesuatu yang tak dapat dipisahkan dengan dan dari kehidupan manusia, mulai dari eksisnya sampai dengan era kontemporer dewasa ini (dari manusia yang paling primitif sampai dengan yang paling modern), kapan dan dimana saja, fakta menunjukkan manusia bergumul dengan politik. Kemudian berbagai pengertian politik tersebut secara filosofis dapat dipahami bahwa politik merupakan strategi untuk suatu tujuan bersama manusia (bukan hanya untuk individu dan atau golongan) yaitu suatu kehidupan yang berkeadilan, berkesejahteraan, dan berketentraman dan harus dalam bingkai moralitas dan spiritualitas. Oleh karena itu dalam perspektif filsafat, formulasi politik harus koheren dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang dianut dan diyakini oleh masyarakat akan kebenarannya, semisal suatu kebijaksanaan dan atau kebijakan haruslah berdasarkan dan terurai dari seluruh dimensi kemanusiaan secara holistik, menyeluruh dan mendasar.

Berdasarkan refleksi filosofis di atas, maka dapat dikatakan bahwa politik harus bermula dari manusia, kemudian oleh manusia, dan untuk memanusiakan manusia. Dengan kata lain manusia harus dijadikan sebagai dasar ontologis, epistemologis dan aksiologis bagi struktur, hakikat dan tujuan suatu politik. Relevan dengan makna filosofis tersebut Schmandt<sup>7</sup> menjelaskan bahwa dari tampilan historisitas pemikiran politik benar-benar telah menggambarkan hubungan yang sangat erat antara watak manusia dengan falsafah politik yang dianutnya, sehingga menurut Schmandt politik harus berdasar dan bersumber pada falsafah hidup masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dan di dalamnya harus mencakup asumsi-asumsi

---

<sup>7</sup>Henry J. Schmandt, *A History of Political Philosophy*, Op. Cit. h. 11.

dan keyakinan-keyakinan dasar mengenai manusia dan alam. Artinya politik yang didesain oleh pemikir manapun pada akhirnya sangat ditentukan oleh pemahamannya tentang watak, makna serta tujuan manusia dan alam.

Namun persoalan yang sangat mendasar adalah bahwa tampilan perpolitikan pada era belakangan yang disebut sebagai era global cenderung memperkecil bahkan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan menjadi material semata, sehingga politik menjadi kering dari nilai-nilai spiritual, moral dan keadilan. Paradigma politik kontemporer telah berimplikasi dan menimbulkan kegamangan, kegalauan dan kesemrautan yang cukup memprihatinkan dan bahkan telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan umat manusia. Oleh sebab itu sudah saatnya para pemikir politik merekonstruksi dan memformulasi kembali model politik yang berpihak kepada kemanusiaan sebagai upaya dan solusi untuk keluar dari kemelut politik yang sudah cukup lama menggilas kemanusiaan.

### **Paradigma Politik Kontemporer**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa politik pada era global telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Paradigma politik semacam itu dalam fakta historis berkecambah dari dunia Barat semenjak zaman Yunani kuno dan berkembang sampai dewasa ini. Secara ontologis pemikiran politik Barat disandarkan dan didominasi oleh pandangan *monisme materialisme* spesifik dari zaman modern abad ke-18 M. Falsafah hidup yang berdasarkan pandangan tersebut telah melahirkan pola kehidupan atau peradaban *kapitalisme, individualisme* dan kemudian bermuara pada sistem politik *positivisme*. Sistem politik ini memandang spiritualitas dan moralitas sebagai sesuatu yang tidak ada korelasinya dengan ranah kehidupan dunia termasuk politik, maka bagi politik

*positivism* manusia ditempatkan sebagai makhluk material tanpa spiritual, berjasmani tanpa rohani<sup>8</sup>.

Karakteristik politik di atas, secara faktual telah merambah keseluruhan penjuru dunia, suka atau tidak suka harus diakui bahwa politik Barat sekuler dewasa ini telah menguasai dunia, baik dunia Barat sendiri, maupun dunia Timur termasuk di Indonesia yang *notabene* mayoritas beragama Islam. Eksistensi politik Barathanya digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara mendominasi politik uang (materi), intimidasi, pencitraan yang sesungguhnya kosong dari makna yang sebenarnya, memperkaya diri dan kelompok sendiri dan mematikan karakter manusia yang bukan dari kekelompoknya. Tegasnya, tampilan politik sekuler dapat dilihat dalam perilaku masyarakat yang tidak berpihak kepada kemanusiaan secara holistik, perilaku semacam itu tidak lain adalah sebagai eksese dan implikasi dari perpolitikan positivistik yang sekuler dan tidak berpihak ke-Tuhanan dan berpihak kemanusiaan.

Politik yang hanya sebagai alat untuk mengokohkan kekuasaan dan berlindung dibalik slogan kepentingan publik atau rakyat dan negara sesungguhnya dapat dirunut dari beberapa pemikiran politik Barat yang antara lain adalah Machiavelli. Sebagaimana yang dikutip oleh Rapar<sup>9</sup>, bahwa menurut Machiavelli negara tanpa kekuasaan merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Negara yang ada demi dirinya sendiri membutuhkan kekuasaan yang mutlak. Pada akhirnya Machiavelli tidak mengakui adanya hukum, karena menurutnya

---

<sup>8</sup>Lihat C.A. Qaqr, *Philosophy and Science in the Islamic World*, terjemahan oleh Hasan Basri, (Obor Indonesia, Jakarta), 1991.

<sup>9</sup>J.H. Rapar, *Filsafat Politik*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2002, h. 433.

hukum hanya akan memperburuk situasi dan kondisi negara. Itulah sebabnya yang diajarkan Machiavelli<sup>10</sup> adalah cara-cara binatang (kiasan kekuasaan) dalam pemerintahan negara, mengingat cara-cara manusia yang beradab (hukum) tidak memadai. Dengan kekuasaan, negara dapat melakukan apa saja tanpa dapat dibatasi oleh pertimbangan apapun, dandemi negara, kekuasaan harus mengenyampingkan segala bentuk pertimbangan, apakah itu dibenarkan secara hukum atau tidak, santun atau kejam. Lebih lanjut dikatakan, bahwa agar negara tetap eksis maka penguasa berkewajiban mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya. Menurut Machiavelli yang juga dikutip Rapar, hal itu paling mudah dilakukan, agar kekuasaannya aman, sang penguasa harus menumpas habis penguasa dan keluarganya yang pernah berkuasa di tempat bersangkutan<sup>11</sup>.

Secara reflektif pandangan politik Machiavelli pasti mematkan manusia dan kemanusiaan, dimana hak manusia sebagai warga masyarakat dan warga bumi menjadi terbunuh dan tidak diberikan sedikitpun tempat untuk membangun dan meningkatkan martabatnya sebagai manusia. Secara faktual pemikiran politik Machiavelli yang mematkan kemanusiaan tersebut, masih mengalir sampai sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini sang penguasa terbarukan pasti akan menggilas mantan penguasa lama dan seluruh kerabat dan keluarganya. Penguasa yang baru tidak peduli siapapun orangnya dan bagaimanapun prestasi kerjanya, karena mereka dianggap bukan dari kelompok dan golongannya. Prilaku politik semacam inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan kemudian bermuara pada konflik dan kekacauan, baik konflik bersifat vertikal maupun horizontal. Tegasnya, jika sistem

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 434.

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 444.

politik mematkan kemanusiaan berarti itu mematkan kebersamaan dan keadilan.

Selain Machiavelli, Thomas Hobbes juga mempunyai pandangan yang sama. Seperti yang dikutip Ahmad Suhelmi<sup>12</sup> bahwa menurut Hobbes negara *Leviathan* (sejenis monster atau makhluk raksasa) adalah bentuk negara yang terbaik. Pandangan Hobbes ini merupakan respon intelektual dan refleksi kritisnya atas proses sosial dan sejarah yang berlangsung di hadapannya ketika itu. Suhelmi menambahkan bahwa terkait dengan kondisi tersebut Hobbes menarik dua kesimpulan, yaitu *pertama*; menata masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip normatif seperti agama dan moralitas tidaklah mungkin, karena prinsip-prinsip seperti itu hanyalah kedok-kedok emosi dan nafsu-nafsu hewani yang paling rendah. *Kedua*; masyarakat bisa mewujudkan perdamaian hanya apabila mampu mengenyahkan nafsu-nafsu rendah itu<sup>13</sup>. Manusia merupakan pusat segala persoalan sosial dan politik, namun manusia menurut Hobbes tidak bisa didekati dengan pendekatan normatif religius, karena pendekatan seperti itu semakin menjauhkan dari realitas sosial. Cara yang paling tepat untuk mendekati manusia adalah dengan melihat manusia sebagai alat mekanis dan memahaminya dari pendekatan matematis-geometris<sup>14</sup>. Lebih lanjut Hobbes mengatakan kehidupan manusia hanyalah suatu usaha terus menerus memuaskan sesuai keinginan dan mencari kebahagiaan serta menghindari apa yang tidak disukainya. Manusia akan berusaha untuk menemukan cara dan jalan untuk mencapai

---

<sup>12</sup>Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2001, h. 165.

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 168.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 169.

apapun yang membuatnya senang dan menghindari apapun yang tidak disukainya. Usaha seperti ini didorong oleh akal dan naluri manusia sendiri<sup>15</sup>.

Persahingan antar manusia niscaya terjadi, dan tentunya ada yang menang ada yang kalah. Dalam menghadapi persahingan itu manusia terdorong untuk menggunakan kekuasaan yang ada padanya. Persahingan pasti semakin menguat, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk pemburu kekuasaan. Manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*), semua manusia akan bertarung melawan manusia lain (*bellum omnium contra omnes*)<sup>16</sup>, dan menurut Hobbes bila manusia ingin selamat, maka harus agresif menyerang manusia lain terlebih dahulu sebelum orang lain menyerang dirinya. Watak semacam inilah yang membuat manusia bisa bertahan untuk tetap hidup.

Negara dalam perspektif Hobbes tidak memiliki tanggungjawab apapun terhadap rakyat dan negara pula yang menentukan nilai-nilai moralitas, apa yang dianggap nilai-nilai kebenaran haruslah sesuai dengan yang ditentukan oleh negara, bahkan semua aktivitas sosial harus sesuai dengan yang dibenarkan oleh negara, maka kedekatan pada negara berarti kemudahan memperoleh akses atas kekayaan<sup>17</sup>. Lebih tragis lagi Hobbes mengatakan bahwa negara merupakan lembaga politik yang hanya mengenal hak tapi minus kewajiban. Penguasa diberi hak untuk melakukan apa saja demi kebaikan negara, seperti memaksa dan menggunakan kekerasan sangat dibenarkan, inilah yang dimaksud dengan kekuasaan mutlak bagi Hobbes.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 171.

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 172.

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 177.

Pandangan kedua tokoh pemikir politik tersebut di atas, selain refresentatif untuk menggambarkan paradigma politik Barat modern, juga secara implisit-ekspilisit, faktual-esensial pandangan tersebut masih mengalir sebagai inspirasi politik kontemporer dewasa ini. Salah satu contoh konkret adalah merajalelanya politik uang, intimidasi atau menakut-nakuti pihak pesahing, membumi hanguskan pejabat-pejabat, penguasa-penguasa dan keluarganya yang pernah berkuasa, dendam terhadap masyarakat yang tidak mendukungnya serta bersikap deskriminatif terhadap kelompok yang tidak loyal, bahkan mencari-cari alasan dan kesalahan kelompok pesahing untuk dikuburkan hidup-hidup di bumi. Inilah sesungguhnya gaya politik binatang sebagaimana yang diinginkan Machiavelli dan *homo homini lupus* yang dimaksudkan Hobbes.

Kerakusan politik kekuasaan dalam format pemikiran Hobbes juga secara faktual sangat menghiasi jalannya perpolitikan di era global dewasa ini. Filosofi yang terkandung dalam pernyataan bahwa kekuasaan negara tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai moral dan riligijs (agama) dan penguasa dibenarkan melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaannya hal ini tentu sangat mengganggu bahkan mematikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, nilai-nilai spiritual dan moral. Format politik yang sepenuhnya berpihak kepada penguasa untuk kekuasaannya sudah pasti sangat bertentangan dengan hakikat dan tujuan politik yang sejatinya, karena masyarakat manusia hanya akan dijadikan mangsa yang paling empuk oleh sang penguasa. Masyarakat hanya ditempatkan pada posisi marginal yang artinya secara esensial membonsai kreasi dan cita-cita luhur kodrati manusia. Perpolitikan seperti ini niscaya melahirkan kegalauan dan kecemasan umat manusia, karena konflik horizontal dan vertikal

## Himyari Yusuf: PERGUMULAN PEMIKIRAN POLITIK.....

sebagai akses politik non-kemanusiaan tidak terelakkan. Terkoyaknya rasa kebersamaan dan kesamaan, kekeluargaan dan kerukunan berakibat pada matinya keadilan. Inilah fakta politik kontemporer yang sedang melanda dan sekaligus sebagai musibah kemanusiaan dewasa ini.

Tampilan perpolitikan di atas, pada rahim abad ke-20 dibungkus dengan istilah politik demokrasi yang dipelopori oleh pemikir-pemikir yang berfalsafah hidup *liberalisme*. Seperti dikemukakan oleh Muhammad Azhar<sup>18</sup> bahwa politik demokrasi pada awalnya dibangun atas dasar paham *liberalisme*. Paham demokrasi yang terdapat di Amerika Serikat dan Eropa Barat misalnya, pada hakikatnya adalah suatu paham liberal yang juga berakar dari para pemikir liberal. Dengan demikian, politik demokrasi dalam perspektif filsafati hanya berbeda per-istilahan tetapi esensinya sama bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tetap laksana bumi dan langit dalam kehidupan umat manusia. Model politik demokrasi tetap berpihak kepada manusia kuat dalam ekonomi, pemodal atau berkapital, maka bagi manusia yang rakus kekuasaan akan tetap menjadi penghisap darah sesama manusia dan sekaligus penghancur makhluk kesemestaan lainnya. Manusia yang lemah dalam bidang kapital (ekonomi) hanya akan menjadi bulan-bulanan bagi orang yang bermodal. Prilaku borjuistik dan individualistik adalah ciri khas utama bagi politik demokrasi yang diagung-agungkan dewasa ini. Slogan demi masyarakat dan bangsa tidak lebih dari alat untuk merengkuh kekuasaan dan kekayaan.

---

<sup>18</sup> Lihat Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Islam dan Barat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 1996. Dalam tulisan ini menjelaskan sejarah politik Barat dari zaman Yunani hingga abad modern. Perjalanan politik Barat ternyata sangat kompleks, mulai dari politik feodalisme sampai dengan politik demokrasi. Namun berbagai macam politik yang komplek itu pada hakikatnya sama yaitu menguatamakan kekuasaan ketimbang mensejahterakan masyarakat manusia.

### **Politik Islam dalam Bingkai Filosofis**

Eksistensi politik Islam tentu sangat berbeda dengan politik Barat sebagaimana telah dijelaskan di atas. Secara esensial politik Islam sudah ada semenjak Islam itu ada. Walaupun pengkajiannya secara otonom terbilang masih belum lama jika dibanding dengan politik Barat. Seperti dikemukakan Muhammad Azhar<sup>19</sup> bahwa sarjana Islam yang pertama kali menuangkan teori politiknya dalam suatu karya ilmiah adalah Syihab al-Din Ahmad Ibn Rabi' yang hidup di Baghdad semasa pemerintahan Mu'tasim, khalifah Abbasiyah kedelapan.

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui bahwa Islam diturunkan ke bumi oleh pencipta kesemestaan (Allah) melalui Rasul-Nya Muhammad SAW. Dengan demikian tentunya politik Islam dapat diasumsikan identik dengan kehadiran Islam dan secara implisit politik Islam tercermin dalam perjuangan Nabi Muhammad saat menyebar luaskan ajaran Islam. Artinya eksistensi politik Islam sudah dapat dirunut dan dianalisa semenjak masa Nabi Muhammad, baik pada priode Makkah maupun Madinah. Seperti dikatakan oleh Ridwan<sup>20</sup> bahwa bagi umat Islam, semua aspek kehidupan Nabi Muhammad yang berupa ucapan, perbuatan, baik kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul, pribadi, kepala rumah tangga, tokoh masyarakat, maupun sebagai imam atau pemimpin umat, merupakan sumber rujukan dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang politik dan ketatanegaraan dan tentunya setelah al-Qur'an. Hal mana dipertegas pula oleh Hans Daiber dalam Ensiklopedi Tematis Filsafat

---

<sup>19</sup>Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Islam dan Barat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 1996, h. 75.

<sup>20</sup>Ridwan HR, *Fiqih Politik*, (UII Press, Yogyakarta), 2007, h. 111-112.

## Himyari Yusuf: PERGUMULAN PEMIKIRAN POLITIK.....

Islam, bahwa sebagai pemimpin umat Islam, Nabi Muhammad menyatukan kepentingan agama dengan tuntutan politik yang secara harfiah berarti pemerintahan. Dalam piagam Madinah umat Islam menyatakan solidaritas untuk melawan musuh bersama dan menerima Muhammad sebagai nabi dan juru damai<sup>21</sup>. Dapat dipahami, penegasan Daiber itu sekaligus mempertegas bahwa nabi Muhammad benar-benar menjadi referensi umat dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam hal politik pemerintahan.

Secara historis masyarakat Arab Makkah memang memiliki tradisi yang religius. Misalnya sebelum kehadiran nabi Muhammad (Islam) masyarakat Arab Makkah dalam aktivitas sosial, politik dan ekonomi selalu relevan dengan agama yang mereka anut pada saat itu. Bagi masyarakat Arab Makkah agama diakui sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan politiknya<sup>22</sup>. Dapat ditegaskan pula, bahwa sistem sosial, politik dan ekonomi masyarakat Makkah dibangun atas prinsip-prinsip yang relevan dengan agama, baik sebelum maupun sesudah hadirnya Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka tampilan politik Nabi Muhammad, dapat dibagi dalam dua kurun waktu, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah kehadiran Nabi Muhammad sesungguhnya bukanlah memutuskan agama dengan sistem sosial dan politik, tetapi Nabi Muhammad hanya memutuskan pondasi yang keliru dan tidak sejalan dengan hakikat dan fitrah manusia yang dapat menimbulkan petaka bagi kehidupan manusia<sup>23</sup>. Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi dan orientasi politik

---

<sup>21</sup> Seyyed Hossein Naser, (Ed), *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam*, (Mizan, Bandung), tt., h. 1163.

<sup>22</sup> Ridwan HR., *Op. Cit*, 110.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 112.

Nabi Muhammad (Islam) adalah untuk meluruskan dasar-dasar fundamental politik agar kohern dengan hakikat dan fitrah kemanusiaan. Artinya secara reflektif politik Nabi Muhammad pada periode Makkah memiliki dasar ontologis, aksiologis dari dan untuk kemanusiaan yang bersifat totalitas. Seperti membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu, ber-Tuhan pada benda atau materi, sifat keserakahan, ketidakadilan, kecurangan, kesewenang-wenangan dan moralitas yang destruktif.

Syalabi yang dikutip oleh Ridwan, mengemukakan, penolakan orang-orang Quraisy Makkah terhadap dakwah Nabi Muhammad adalah akibat dari kecemburuan yang berdasarkan nafsu rakus akan keduniawian dan serakah kebendaan (materialistik). Seperti persaingan tidak sehat untuk merebut kekuasaan, ketakutan akan ekonomi kapitalis dan pandangan hidup materialis akan tergoyahkan serta bisnis patung sesembahan tidak dapat lagi menguntungkan<sup>24</sup>. Secara filosofis, sistem politik yang dibangun oleh Nabi Muhammad ketika di Makkah adalah sistem politik yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan (Allah), atau sistem politik yang mengandung nilai-nilai ke-Tuhanan yang sangat kokoh dan mengakar dalam seluruh tatanan kehidupan umat manusia, sehingga formulasi politik adalah keniscayaan untuk kepentingan kehidupan material, spiritual dan moral umat manusia.

Sebagaimana ditegaskan oleh Inu Kencana<sup>25</sup> bahwa pada kenyataannya selain sebagai Rasul Allah, Nabi Muhammad juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nabi Muhammad

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 113.

<sup>25</sup>Inu kencana, *Op. Cit.*, h. 233.

## Himyar Yusuf: PERGUMULAN PEMIKIRAN POLITIK.....

mendirikan negara bersama masyarakat Anshar dan masyarakat Muhajirin. Kemudian menciptakan konstitusi, memberi perlindungan kepada seluruh umat, baik muslim maupun non-muslim, membuat ikrar kebulatan tekat Aqabah, meletakkan dasar-dasar peraturan negara, dan semata-mata hanya menjalankan hukum keadilan, mengkhotbahkan persamaan antara seluruh manusia serta kewajiban untuk saling tolong-menolong dan juga persaudaraan universal manusia. Ringkasnya, sebagai pemimpin umat, Nabi Muhammad mengambil berbagai langkah politik demi kelangsungan dan kenyamanan kehidupan masyarakat. Hal yang sangat menarik adalah dalam sistem politiknya kekuasaan tertinggi adalah ditangan Tuhan. Tuhan menempati posisi yang amat sentral dalam segala bentuk kebijakan dan manifestasi pemikiran dan sistem politik<sup>26</sup>.

Garis-garis besar politik Nabi Muhammad (Islam) di atas, sesungguhnya mengandung makna filosofis yang sangat mendasar dan juga sangat rasional, di mana seluruh strategi politik Islam sepenuhnya tercurahkan untuk kepentingan umat (kemanusiaan universal). Nilai-nilai keagamaan (ke-Tuhanan) dan kemanusiaan dijadikan sebagai dasar fundamental (ontologis) dalam perpolitikan, baik itu untuk menata kehidupan sosial masyarakat maupun untuk kepentingan politik pemerintahan, sehingga atmosfer kehidupan masyarakat tidak tercerabut dari nilai-nilai spiritualitas dan moralitas, bahkan nilai-nilai tersebut menjadi cerminan karakteristik masyarakat yang paling utama. Paradigma kehidupan umat terfokus kepada rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan kesamaan, kerukunan dan kekeluargaan yang akhirnya bermuara kepada keadilan yang merata bagi seluruh umat manusia. Setelah periode Nabi Muhammad di Makkah dan di Madinah, kepemimpinan selanjutnya diteruskan oleh para sahabat atau

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 234.

yang disebut masa Khulafa al-Rasyidin. Pada masa ini paradigma politik Islam nyaris tidak berbeda dengan politik periode Nabi Muhammad, karena keempat sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Bin Khatthab, Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib yang memimpin pasca Nabi Muhammad merupakan penerus dari sistem perpolitikan yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad, walaupun secara praktis terdapat sedikit perbedaan pendapat dikalangan umat ketika itu<sup>27</sup>.

Secara esensial sistem politik yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, menunjukkan adanya koherensi dengan politik Islam pada periode sebelumnya, dimana yang menjadi dasar fundamental sistem politik adalah keyakinan bahwa kekuasaan yang diberikan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah pencipta kesemestaan, selain juga dipertanggungjawabkan terhadap sesama manusia. Seperti terlihat dalam salah satu kalimat pidato Abu Bakar Siddiq pada saat pelantikannya yang dikutip Inu Kencana, *“taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi apabila saya melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, gugurkanlah kesetiaan kalian kepada saya*<sup>28</sup>. Demikian pula halnya Umar Bin Khatthab yang dijuluki sebagai singa padang pasir. Selaku pejabat pemerintahan pengganti Abu Bakar, Umar merasa risau dengan keadaan pemerintahannya yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Atas dasar kerisauan tersebut, maka dalam mengentaskan berbagai problem kemanusiaan Umar bergabung langsung di tengah-tengah masyarakat,

---

<sup>27</sup>Penjelasan yang lebih rinci dapat dilihat pada karya Inu Kencana, *Ilmu Politik*, (Rineka Cipta, Jakarta), 2010, h. 244 – 268.

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 246.

agar apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat menjadi jelas dan segera mendapatkan solusinya<sup>29</sup>.

Setelah kepemimpinan Umar Bin Khatthab, kekuasaan kepala negara dan pemerintahan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Pada masa Utsman berkuasa, daerah Islam sudah cukup luas dan bertambah luas, keluasan ini tentunya merupakan hasil politik yang dijalankan oleh para penguasa dan termasuk Utsman. Dalam menanggulangi tuntutan masyarakat, Utsman mengutamakan responsivistik dari pada efektivitas<sup>30</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Utsman tidak bersifat diktator dan juga tidak ingin memperkaya diri sendiri dari kekuasaan yang dimilikinya. Sikap tidak mengikuti keinginan diri sendiri menjadi ciri khas politik Utsman dalam memegang kekuasaan. Keterbukaan politik Utsman tidak hanya terfokus di pusat kekuasaan, melainkan sampai ketinggian daerah-daerah diseluruh wilayah yang dikuasai Islam<sup>31</sup>.

Khalifah atau kepala pemerintahan setelah Utsman adalah Ali bin Abi Thalib. Tercatat dalam salah satu pidatonya dengan para gubernur; *berlaku adillah terhadap manusia dan bersabarlah menghadapi kebutuhan masyarakat, sebab mereka itu adalah perbendaharaan rakyat. Janganlah kalian menghalangi seseorang dari memenuhi keperluannya dan janganlah kalian tolak mereka mengenai permintaannya, dan janganlah kamu jual pakaian dan hewan milik rakyat, dan janganlah kalian sekali-kali memukul seseorang hanya karena satu dirham yang tidak dapat dilunasi*<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup>Ibid, h. 250.

<sup>30</sup>Ibid, h. 258-259.

<sup>31</sup>Ibid, h. 256-257.

<sup>32</sup>Ibid, h. 263.

Pernyataan Ali bin Abi Thalib dalam pidato tersebut di atas, secara reflektif mengandung nilai-nilai filosofis yang dahsyat dan luar biasa. Trem keadilan dan kesabaran sangat dominan dalam politik Khalifah keempat ini. Pelayanan prima, keterbukaan, tidak mengintimidasi, tolong menolong, dan tidak menyakiti rakyat menjadi kewajiban sang penguasa dan jajarannya. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pernyataan Ali bin Abi Thalib tersebut, niscaya menunjukkan bahwa politiknya sangat menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan dan sekaligus sebagai implementasi dari perintah Tuhan. Artinya kebijakan politik Ali bin Abi Thalib juga sejalan dengan kebijakan politik sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan ketiga sahabat pendahulunya. Pada intinya dapat dikemukakan bahwa semenjak periode Nabi Muhammad sampai ke periode Khulafa al-Rasyidin, yang menjadi dasar fundamental sistem politik adalah nilai-nilai ke-Tuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan serta yang menjadi sumber paling utama adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, kemudian fokus atau orientasi politik adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan manusia, baik yang bersifat spiritual-rohaniah maupun yang bersifat material jasadiyah yang terbentuk secara seimbang atau dalam formulasi bangunan tauhidi.

Sejarah mencatat bahwa setelah lepas dari periode Khulafa al-Rasyidin, sistem politik Islam sedikit mengalami pergeseran. Menurut para pemikir Islam pergeseran yang terjadi adalah sebagai akibat dari semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, sehingga karakteristik dan kebudayaan masyarakat yang baru bergabung dengan Islam menjadi tak terelakkan dalam mewarnai masyarakat Islam, selain itu

tidak sedikit pula yang timbul dari dalam masyarakat Islam sendiri, seperti terjadinya perang Shiffin dan lain sebagainya<sup>33</sup>.

#### Daftar Pustaka

Aristoteles, 2004, *Politics*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, (Bentang Budaya, Yogyakarta).

C.A. Qaqr, 1991, *Philosophy and Science in the Islamic World*, terjemahan oleh Hasan Basri, (Obor Indonesia, Jakarta).

Henry J. Schmandt, 2002, *A History of Political Philosophy*, Terjemahan, Ahmad Baidhowi, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta).

Harun Nasution, 1985, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (UI Press, Jakarta).

Inu Kencana Syafe'i, 2010, *Ilmu Politik*, (Rineka Cipta, Jakarta).

Inu Kencana, 2007, *Pengantar Filsafat*, (Refika Adinata, Bandung).

J.H. Rapar, 2002, *Filsafat Politik*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta).

Lukman Ali (dkk), 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Balai Pustaka, Jakarta).

Loren Bagus, 2000, *Kamus Filsafat*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).

Muhammad Azhar, 1996, *Filsafat Politik Perbandingan Islam dan Barat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta).

---

<sup>33</sup>Syafei Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Mizan, Bandung), 1994, h. 10-11.

Himyari Yusuf: PERGUMULAN PEMIKIRAN POLITIK...

Muhammad Iqbal & Amin Husein, 2010, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Kencana, Jakarta).

Ridwan HR, 2007, *Fiqih Politik*, (UII Press, Yogyakarta).

Seyyed Hossein Naser, (Ed), *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam*, (Mizan, Bandung).

Syafei Ma'arif, 1994, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Mizan, Bandung).